

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk tertinggi keempat di dunia setelah Cina pada urutan pertama, India pada urutan kedua, dan Amerika Serikat di urutan ketiga (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2018). Berdasarkan Sensus Penduduk yang diselenggarakan pada bulan September 2020, banyaknya penduduk di Indonesia tercatat sejumlah 270,200 juta jiwa. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 32,56 juta jiwa berdasarkan hasil Sensus Penduduk yang diselenggarakan pada bulan Mei 2010 (Badan Pusat Statistik, 2020). Jika mempertimbangkan pertumbuhan penduduk yang terjadi di Indonesia, angka tersebut masih tergolong cukup tinggi (Mu'awwanah et al., 2020).

Setiap manusia merupakan kunci utama terhadap permasalahan pertumbuhan populasi global. Populasi suatu negara akan meledak jika kontrol terhadap laju peningkatannya semakin berkurang. Kehidupan yang kurang sejahtera dapat terjadi jika pertumbuhan penduduk tidak didukung oleh adanya sarana dan prasarana yang memadai (Mu'awwanah et al., 2020). Permasalahan pertumbuhan populasi manusia yang pesat adalah sebuah permasalahan yang dialami oleh negara-negara berkembang, misalnya Indonesia. Pesatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia menyebabkan angka kemiskinan serta angka pengangguran juga mengalami peningkatan (Trisnu & Sudiana, 2019). Suatu negara harus mempunyai rencana atau strategi untuk mengatasi permasalahan ini guna memerangi pertumbuhan penduduk yang pesat. Untuk menunjang pembangunan

masyarakatnya, negara juga harus mampu membangun serta meningkatkan infrastruktur serta fasilitasnya.

Gambar 1. 1 Laju Pertumbuhan serta Jumlah Penduduk di Indonesia, Pada Tahun 1961-2020



Sumber : (Berita Satu, 2021)

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia berfokus menjalankan program Keluarga Berencana (KB) sebagai solusi dari permasalahan jumlah penduduk yang terus bertambah. Terbentuknya Program Keluarga Berencana (KB) diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan serta pembangunan masyarakat Indonesia. Penyelenggaraan dari program Keluarga Berencana Nasional, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, telah dimandatkan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang mempunyai peran untuk menjalankan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP). Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN adalah Lembaga *Non-Kementerian*

yang bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia, 2020).

Badan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (BKKBN) juga diberikan mandat untuk dapat mewujudkan tercapainya Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita), utamanya agenda nomor 5 (lima) yakni meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana, serta melaksanakan pembangunan dimensi manusia di bidang kesehatan dan kesehatan jiwa atau karakter (revolusi mental), yang berkaitan dengan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Pemerintah Pusat Tahun 2015–2019. Namun, Program KKBPK ini pada pelaksanaannya menghadapi sejumlah permasalahan atau tantangan yang memerlukan perhatian khusus, seperti pencapaian program yang stagnan dan pelaksanaan program lapangan yang semakin buruk (Anggraini & Mashur, 2019). Hal ini berdasarkan temuan dari penilaian internal yang dilakukan atas permintaan Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo. Dari situlah dikembangkan sejumlah inovasi strategis guna memperkuat program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) periode 2015–2019, khususnya pelaksanaan agenda prioritas yang berpotensi mengintensifkan upaya untuk memenuhi target atau tujuan yang telah ditetapkan dan memperluas pelaksanaan program secara keseluruhan. Salah satu inovasi strategis yang memungkinkan program KKBPK dapat sepenuhnya menjalankan tugas prioritasnya di lapangan adalah Kampung Keluarga Berencana. Kampung Keluarga Berencana merupakan bentuk atau model skala pelaksanaan program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga) secara utuh, yang dilaksanakan pada tingkat pemerintahan paling bawah di seluruh Kabupaten atau Kota. Program ini melibatkan seluruh sektor di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan bekerjasama dengan kementerian atau lembaga, mitra kerja, pemangku kepentingan, dan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah. (BKKBN, 2022).

Program Kampung Keluarga Berencana pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo pada awal tahun 2016. Tujuan awalnya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan akses masyarakat terhadap program Keluarga Berencana. Namun, berdasarkan data terbaru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2021, nama program ini telah diubah menjadi Kampung Keluarga Berkualitas (Chairani, 2021). Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau, Mediheryanto mengungkapkan apabila:

“Hal itu sesuai arahan Presiden, Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri, sekarang kampung KB dirubah menjadi kampung keluarga berkualitas.”
(<https://www.tanjungpinangkota.go.id/berita/kampung-kb-kini-jadi-kampung-keluarga-berkualitas>) Diakses pada tanggal 07 September 2023

Kampung Keluarga Berkualitas adalah suatu wilayah administratif setingkat desa yang dibentuk untuk mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan keluarga. Melalui pendekatan yang komprehensif, Kampung Keluarga Berkualitas bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ketahanan keluarga, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (BKKBN, 2022). Dalam upaya mewujudkan keluarga Indonesia yang berkualitas, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022. Instruksi ini secara

tegas mengamankan optimalisasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di seluruh desa dan kelurahan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memberdayakan masyarakat, serta memperkuat pondasi keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022). Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) mulai berlaku sejak tanggal 20 Mei 2022.

Program Kampung Keluarga Berkualitas yang dicanangkan oleh BKKBN pada tahun 2023 telah berhasil menjangkau 57.563 wilayah di seluruh Indonesia. Provinsi Jawa Timur mencatatkan capaian tertinggi dengan jumlah Kampung KB sebanyak 6.264. Kabupaten Kediri merupakan salah satu dari sekian banyak kabupaten di Jawa Timur yang telah melaksanakan program ini (BKKBN, 2023). Hal ini dikarenakan Kabupaten Kediri juga menjadi target atau sasaran dari Program Kampung Keluarga Berkualitas (Cheerli, 2020). Kabupaten Kediri sendiri merupakan sebuah wilayah yang berada di Provinsi Jawa Timur yang secara geografis berbatasan langsung dengan Kabupaten Jombang pada sebelah utara, pada sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung serta Kabupaten Blitar, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang di timur, serta Kabupaten Nganjuk di sebelah barat dan utara. (Universitas STEKOM, 2023).

Berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia, pada tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Kediri berada di urutan keenam dengan jumlah mencapai 1.656.020 jiwa dibawah Kabupaten Banyuwangi. (BPS, 2023). Apabila dilihat dari wilayah eks karesidenan Kediri, Kabupaten Kediri di antara kabupaten di

sekelilingnya merupakan wilayah administrasi yang paling luas kedua (setelah Kabupaten Blitar) dengan jumlah penduduk yang paling besar. (BPS Kabupaten Kediri, 2023).

Tabel 1. 1 Perbandingan Jumlah Penduduk Wilayah Eks Karesidenan Kediri

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Kabupaten Kediri	1.656.020
2	Kabupaten Blitar	1.240.320
3	Kabupaten Tulungagung	1.105.340
4	Kabupaten Trenggalek	739.670
5	Kota Kediri	289.420
6	Kota Blitar	151.960

Sumber : (BPS Kabupaten Kediri, 2023)

Mengingat Kabupaten Kediri juga menjadi target atau sasaran dari Program Kampung Keluarga Berkualitas, maka program tersebut mulai terbentuk sejak tahun 2016 (BKKBN, 2022). Pada awal dicanangkannya Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Kediri, hanya satu kecamatan yang terbentuk yakni di Kecamatan Gurah. Namun, seiring berjalannya waktu Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Kediri mulai meluas di kecamatan-kecamatan lainnya. Berikut merupakan tabel pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Kediri (BKKBN, 2023).

Tabel 1. 2 Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Kabupaten Kediri Tahun 2016-2023

No	Kecamatan di Kabupaten Kediri	Tahun Pembentukan								Jumlah
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Semen	0	1	0	1	0	0	0	0	2
2.	Mojo	0	1	2	1	1	0	0	0	5
3.	Kras	0	1	0	0	1	0	1	0	3
4.	Ngadiluwih	0	1	1	2	0	0	0	0	4
5.	Kandat	0	1	0	0	0	0	0	0	2
6.	Wates	0	1	1	0	1	0	0	0	5
7.	Ngancar	0	1	3	1	0	0	0	0	2
8.	Puncu	0	1	0	0	0	0	0	0	1
9.	Plosoklaten	0	1	0	0	2	0	0	0	3
10.	Gurah	1	1	2	0	0	0	0	0	4
11.	Pagu	0	1	0	1	0	0	0	0	2
12.	Gampengrejo	0	1	1	0	0	0	0	0	2
13.	Grogol	0	1	2	0	0	0	0	0	3
14.	Papar	0	1	1	1	0	0	0	0	3
15.	Purwoasri	0	1	2	0	1	0	0	0	4
16.	Plemahan	0	1	2	1	0	0	0	0	4
17.	Pare	0	1	0	2	0	0	0	0	3
18.	Kepung	0	1	1	1	1	0	0	0	4
19.	Kandangan	0	1	1	0	1	0	0	0	3
20.	Tarokan	0	0	1	1	1	0	0	1	4
21.	Kunjang	0	1	2	1	0	0	0	0	4
22.	Banyakan	0	1	2	0	0	0	0	0	3
23.	Ringinrejo	0	1	2	1	0	0	2	0	6
24.	Kayen Kidul	0	1	2	0	0	0	0	0	3
25.	Ngasem	0	1	0	0	0	0	1	0	2
26.	Badas	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Total	1	25	28	14	9	0	4	0	82

Sumber : (BKKBN, 2022)

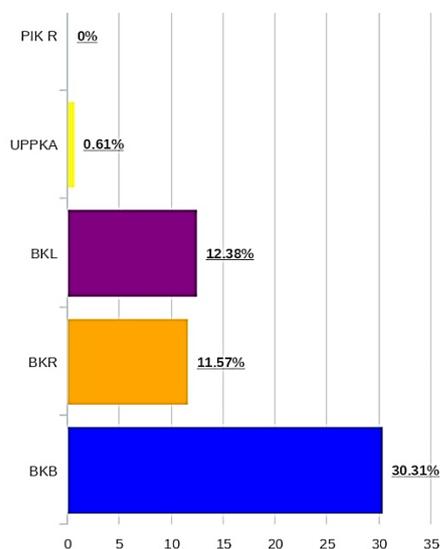
Berdasarkan tabel diatas, jumlah pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas yang sudah terbentuk di Kabupaten Kediri hingga tahun 2023 yakni 82 Kampung Keluarga Berkualitas yang terdiri dari 26 kecamatan, pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas paling banyak terjadi di tahun 2018 sejumlah 28 Kampung Keluarga Berkualitas. Diantara 26 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kediri. Salah satu kecamatan yang ditunjuk untuk menjalankan program Kampung Keluarga Berkualitas yakni Kecamatan Banyakan. Kecamatan Banyakan

memiliki 3 Kampung Keluarga Berkualitas yakni di Desa Manyaran, Desa Ngablak, dan Desa Sendang.

Desa Manyaran merupakan salah satu desa yang pertama kali ditunjuk untuk menyelenggarakan Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan Banyakan yakni pada tanggal 04 Desember 2017. Sehingga, Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri saat ini sudah berjalan selama 6 tahun. (BKKBN, 2023). Terdapat hal yang melatarbelakangi berdirinya Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Manyaran adalah rendahnya angka penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang serta tingginya angka pernikahan usia dini, sehingga harapannya Kampung Keluarga Berkualitas menjadi jalan keluar dari permasalahan tersebut. Hal lain yang menjadi potensi dari dicanangkannya di Desa Manyaran yakni Desa Manyaran merupakan desa yang berada di perbatasan antara Kota Kediri dan Kabupaten Kediri. (Alfua, 2021).

Program Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri memiliki beberapa kelompok kegiatan diantaranya yaitu, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Berikut merupakan persentase dari partisipasi masyarakat Desa Manyaran dalam Poktan (Kelompok Kegiatan) Program Kampung Keluarga Berkualitas.

Gambar 1. 2 Partisipasi Masyarakat Desa Manyaran Dalam Poktan (Kelompok Kegiatan) Program Kampung Keluarga Berkualitas



Sumber : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2023)

Berdasarkan gambar diatas, diperoleh data partisipasi masyarakat Desa Manyaran dalam Kelompok Kegiatan (Poktan) Program Kampung Keluarga Berkualitas yakni Bina Keluarga Balita (BKB) sebesar 30,31%, Bina Keluarga Berkualitas yakni Bina Keluarga Balita (BKB) sebesar 30,31%, Bina Keluarga Remaja (BKR) sebesar 11,57%, Bina Keluarga Lansia (BKL) sebesar 12,38%, dan partisipasi masyarakat terendah yakni Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor sebesar 0,61% (BKKBN, 2023). Salah satu aspek keberhasilan dari Program Kampung Keluarga Berkualitas yakni adanya partisipasi aktif dari masyarakat (Asnani & Shodiq, 2022). Terdapat lima indikator dari keberhasilan Program Kampung Berkualitas, berdasarkan pedoman pelaksanaannya. Menurut (Endah & Kholiq, 2019), hal-hal tersebut yakni seperti komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan di semua tingkatan, integritas lintas sektor, optimalisasi

fasilitas dan dukungan mitra, semangat dan komitmen pengurus kampung keluarga berkualitas, dan keterlibatan masyarakat (partisipasi) yang intens. Diperlukan partisipasi atau keterlibatan aktif masyarakat guna keberlanjutan pengelolaan Program Kampung Keluarga Berkualitas. Partisipasi masyarakat juga sangat berdampak signifikan terhadap kinerja program dan proses pembangunan keluarga (Asnani & Shodiq, 2022). Namun, berdasarkan data yang diperoleh melalui (BKKBN, 2023) menunjukkan apabila partisipasi masyarakat Desa Manyaran dalam Kelompok Kegiatan Program Kampung Keluarga Berkualitas tergolong rendah. Terutama pada Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang hanya memiliki partisipasi sebanyak 11,57% dari 1.556 Keluarga yang memiliki remaja, Bina Keluarga Lansia (BKL) yang hanya memiliki partisipasi sebanyak 12,38% dari 808 keluarga yang memiliki lansia. Selain itu, kelompok kegiatan pada Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan belum dilaksanakan secara merata di setiap dusun. Seperti Bina Keluarga Balita (BKB) yang hanya dilaksanakan di Dusun Kenton dan Dusun Manyaran. Kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang hanya dilaksanakan di Dusun Putat dan Dusun Ngesong. Kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) yang hanya dilaksanakan di Dusun Kenton dan Dusun Kasian. Dan pada kelompok kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) hanya dilaksanakan di Dusun Manyaran dan Manyarejo.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan oleh Silmi Afiani Alfua (2021) dengan judul “Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB)

dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Berkualitas pada Masa Pandemi *Covid-19* di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri” dapat disimpulkan tidak terealisasi. Hal ini disebabkan karena masih ditemukan warga Kampung Keluarga Berencana di Desa Manyaran yang belum menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang atau mengikuti program Keluarga Berencana (KB), yang kemudian berdampak pada kehamilan yang tidak terencana dan jumlah anak yang tidak sesuai dengan kriteria keluarga berkualitas. Selain itu terdapat penelitian dari Rizky Sintiah Putri (2021) dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Program Kampung KB di Masa Pandemi (Studi Kasus Desa Sumberkarang Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto)” memberikan hasil penelitian apabila pada masa pandemi, masyarakat yang mengikuti Program Kampung Keluarga Berencana semakin sedikit. Hal ini disebabkan oleh adanya kekhawatiran masyarakat terhadap penyebaran *Covid-19*. Kegiatan program kampung keluarga berencana saat itu sangat dibatasi selama pandemi sebagai usaha untuk memutus rantai penyebaran *Covid-19*. Penelitian berikutnya yaitu oleh Nur Fitria Ramadhani, Tukiman (2020) yang berjudul Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Di Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya yang memberikan hasil apabila komunikasi dalam penyelenggaraan Program Kampung KB di Kelurahan Sidotopo sudah terimplementasi, sumber daya belum optimal karena kendala dana yang dianggarkan dalam kegiatan sosialisasi untuk konsumsi masyarakat, disposisi terkait sikap pelaksana yang selalu aktif dalam penyuluhan sosialisasi guna untuk meningkatkan ketanggapan respons masyarakat untuk ber-KB, dan faktor struktur

birokrasi sudah memiliki SOP dan struktur organisasi secara tertulis bagi Tim Pokja Kampung KB Kelurahan Sidotopo.

Berdasarkan beberapa uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai partisipasi dari masyarakat Desa Manyaran dalam Program Kampung Keluarga Berkualitas dan mengadakan penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Program Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah “Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam Program Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri”

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai partisipasi masyarakat ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang terkait. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu untuk perkembangan ilmu administrasi publik, terkhusus bidang pengembangan partisipasi masyarakat serta pemberdayaan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Menambah wawasan serta pengetahuan mengenai partisipasi masyarakat melalui Program Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan ataupun terhadap perbaikan serta evaluasi implementasi dari Program Kampung Keluarga Berkualitas, khususnya di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri supaya dimasa yang akan datang dapat berjalan lebih baik.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa hasil atau laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut dapat dipergunakan untuk referensi ataupun literatur penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat.